

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Mengingat tujuan utama dari pembangunan adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara maka diperlukan peran aktif pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Keberhasilan dari suatu pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi menunjukkan grafik yang baik secara konsisten maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Dengan kata lain pembangunan yang dilakukan telah berhasil. Pembangunan yang dilakukan pun harus lebih merata agar angka kemiskinan serta pengangguran bisa semakin berkurang (Rahmadi dan Parmadi, 2019). Pembangunan ekonomi sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara mengelola ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk menghindari ketidakmerataan dalam pembangunan (Raharti, dkk, 2021).

Sejatinya setiap negara didunia mempunyai tujuan utama yakni untuk mensejahterakan masyarakat atau meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan suatu proses yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan pada struktur sosial, sikap mental, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Saat ini persoalan ekonomi yang menjadi pembahasan utama khususnya di negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan sudah sepatutnya menjadi perhatian pemerintah karena persoalan ini merupakan persoalan yang krusial. Untuk itu, diperlukan sejumlah kebijakan yang dapat mengatasi persoalan tersebut sehingga masyarakat bisa terbebas dari dimensi kemiskinan. Usaha yang dilakukan pemerintah harus mencakup berbagai aspek kehidupan agar upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan dapat berhasil.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun jika melihat fakta di lapangan ternyata tujuan tersebut belum tercapai. Hal ini dikarenakan fenomena kemiskinan yang masih terjadi ditengah masyarakat kita. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang dilakukan harus berjalan secara adil dan merata. Begitupun juga

pemerintah daerah yang harus bisa melaksanakan tugas dan wewenang sebagai otoritas yang diberikan mandat untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Masalah ini perlu diperhatikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Kemiskinan yang terjadi memang sulit untuk benar-benar dihilangkan tetapi angkanya masih bisa dikendalikan tergantung dari bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut (Muljanto, 2021).

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling kecil atau minimum. Kemiskinan juga merupakan *cross section problem*, *cross areas* dan *cross generation* sehingga dalam menangani permasalahan ini dibutuhkan pendekatan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Persoalan kemiskinan merupakan isu yang sangat kompleks dan memiliki sifat multidimensional dimana berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan selalu menjadi masalah yang paling fenomenal di belahan dunia, dikarenakan sifatnya yang multidimensional maka kemiskinan juga membutuhkan solusi yang bersifat multidimensional pula. Berbagai program baik dari pemerintah pusat ataupun daerah selalu diusahakan dalam menekan angka kemiskinan. Bahkan isu kemiskinan menjadi salah satu agenda penting dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai kelanjutan dari MDGs (*Millenium Development goals*) yang sudah berakhir di tahun 2015 (Jacobus, dkk, 2021).

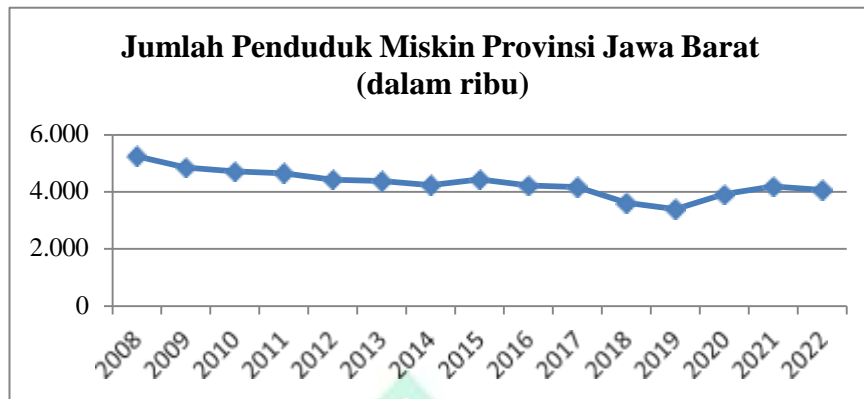
Kemiskinan termasuk ke dalam salah satu persoalan kemanusiaan. Hal ini membuat kemiskinan menjadi sebuah tanggung jawab moral bagi setiap manusia untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. Tammie O'Nei mengatakan bahwa "*Human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty*". Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dikurangi apalagi dicabut. Dari perspektif ini masalah kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka-angka statistik saja. Sekecil apapun angka statistik, didalamnya terdapat persoalan manusia yang terancam hidupnya. Jika kemiskinan terjadi dalam keluarga, disitu terdapat anak-anak yang mungkin akan menghadapi masalah sampai di tahap tidak bisa menikmati pendidikan, kelaparan, kekurangan gizi hingga kesehatan atau bahkan jiwanya terancam. Adanya kemiskinan adalah tanggung jawab lingkungan baik dalam hal

penyebab maupun solusinya. Oleh karena itu, berbagai kajian maupun upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya masih faktual tetapi juga masih sangat dibutuhkan (Ishartono dan Raharjo, 2021).

Kemiskinan memang menjadi isu penting dalam dunia perekonomian. Di Jawa Tengah kemiskinan disebabkan karena upah minimum yang diterima oleh para tenaga kerja masih dibawah kebutuhan hidup layak. Yang artinya meskipun upah selalu mengalami kenaikan tidak akan berarti apabila nominal kebutuhan hidup layak masih berkisar diatas jumlah upah minimum. Selain upah minimum, pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas penduduk dan peningkatan sumber daya pangan menjadikan kemiskinan semakin meningkat serta tidak terkendali (Sari 2021). Wangtafendirra (2022) menyatakan bahwa angka kemiskinan di Kepulauan Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti angka kelahiran yang tidak terkendali karena keterbatasan informasi oleh masyarakat, migrasi para tenaga kerja yang tidak mampu bersaing akibat kurangnya kemampuan dan kualitas mereka, adanya kenaikan upah minimum yang menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja sehingga membuat tingkat kesejahteraan pekerja menurun karena tidak memiliki penghasilan, dan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup menampung banyaknya angkatan kerja sehingga meningkatkan pengangguran dan angka kemiskinan semakin bertambah.

Di antara provinsi-provinsi di Indonesia, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi. Dikutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat cenderung fluktuatif selama 15 tahun terakhir. Dengan melihat angka kemiskinan yang masih tinggi tentu sangat ironis mengingat Provinsi Jawa Barat menjadi penopang perekonomian nasional dan pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain itu Jawa Barat juga merupakan pusat kawasan industri terbesar di Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat memiliki jumlah industri sebanyak 667.795 di tahun 2022. Tingginya angka kemiskinan disebabkan karena sejumlah faktor seperti tingkat pendapatan rumah tangga sangat rendah atau tidak memiliki pendapatan sama sekali, tidak memiliki pendidikan dan keterampilan sangat rendah atau tidak sekolah baik di pendidikan formal maupun informal, dan rendahnya tingkat kesehatan serta tidak cukup memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Sehingga hal ini menjadi jawaban atas banyaknya kawasan

industri di Jawa Barat dan menjadi provinsi dengan pendorong perekonomian nasional namun jumlah penduduk miskin yang juga masih banyak.



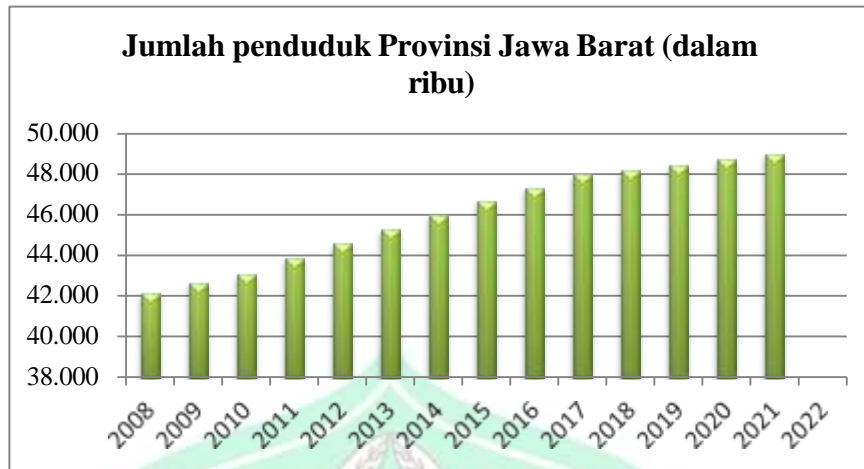
Gambar 1.1

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di tahun 2008 dengan jumlah sebanyak 5.249.000 orang sedangkan jumlah paling sedikit di tahun 2019 yaitu 3.399.000 orang. Kemudian terjadi kenaikan secara berturut-turut dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Menurut teori Neo Liberal dan teori Marjinal mengungkap bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Masyarakat menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter, apatis, kurang usaha, hanya menyerah pada nasib, sistem keuangan yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi untuk membangun masa depan, dan kekerasan banyak terjadi (Susanto dan Pangesti, 2020).

Teori Neo Liberal dan teori Marjinal menekankan pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi namun tidak diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik maka akan menimbulkan permasalahan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia sehingga dengan kenyataan tersebut membuat Provinsi Jawa Barat mengalami beberapa masalah perekonomian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi. Menurut Sukirno dalam Andykha, dkk (2019) menyampaikan bahwasanya jumlah penduduk yang besar dalam pembangunan suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu

kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kemiskinan. Berikut merupakan data terkait jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat selama 15 tahun terakhir



Gambar 1.2

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data yang disajikan diatas jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan dari mulai tahun 2008 yang hanya berjumlah 42 juta jiwa penduduk menjadi 49 juta jiwa di tahun 2022. Pertumbuhan penduduk yang tinggi seperti di Provinsi Jawa Barat memang harus lebih diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas manusia dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan seperti pembangunan pendidikan juga akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa yang akan datang, pembangunan kesehatan harus mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, untuk penduduk miskin peningkatan kualitasnya dapat dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis.

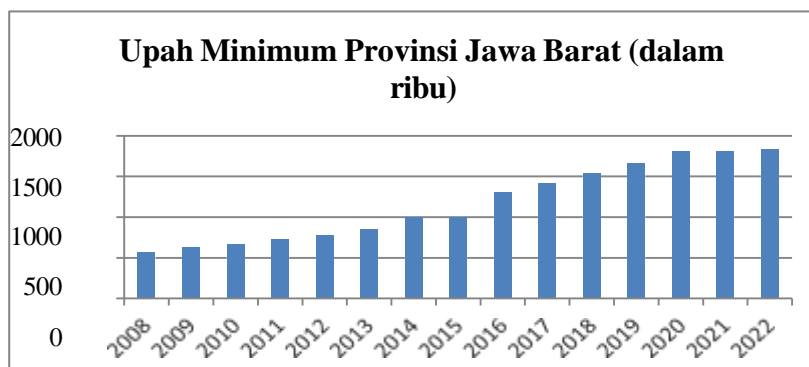
Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk ini tentunya akan membuat kabupaten dan kota di provinsi tersebut memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Tercapainya pemerataan kesejahteraan tentunya menjadi tujuan pemerintah khususnya di Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbanyak di Indonesia. Namun, perbedaan karakteristik daerah menyebabkan terjadinya variasi kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, kunci dari pemerataan kesejahteraan

pembangunan di Jawa Barat adalah dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusianya karena Jawa Barat memiliki beragam potensi yang luar biasa terutama di sektor ekonomi.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan pertumbuhan penduduk menjadi produktif adalah dengan menciptakan peluang kerja. Selain masalah kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan upah minimum yang ditentukan. Upah merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atas balas jasa kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Di dalam teori permintaan, tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja itu sendiri (Wihastuti dan Rahmatullah, 2018).

Adanya kebijakan tentang pengupahan akan memberikan kepastian terhadap para pekerja untuk mendapatkan upah yang sesuai dan wajar. Pemberian upah kepada para tenaga kerja dapat mencegah kemiskinan namun disaat yang bersamaan juga harus ada kehati-hatian dalam menentukan kebijakan upah. Ketika upah yang ditetapkan terlalu rendah maka akan sulit mendapatkan targetnya. Sebaliknya, jika upah terlalu tinggi dari upah rata-rata maka akan mendorong perusahaan untuk tidak mempekerjakan para pekerja dengan keterampilan yang rendah. Dan hal tersebut tentu menambah daftar panjang kemiskinan serta pengangguran yang ada (Sungkar, dkk, 2018).

Tujuan dari adanya kebijakan penentuan tingkat upah minimum tersebut adalah untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan para tenaga kerja dalam memperoleh haknya sebagai pekerja. Adapun besaran penentuan upah minimum berdasarkan beberapa faktor yakni antara lain seperti kemampuan dari perusahaan, tingkat pengupahan di sektor atau sub sektor yang sama pada provinsi lain, kondisi perekonomian, dan kebutuhan kehidupan pekerja serta keluarga (Rusniati, dkk, 2018).



Gambar 1.3

Sumber: Badan Pusat Statistik

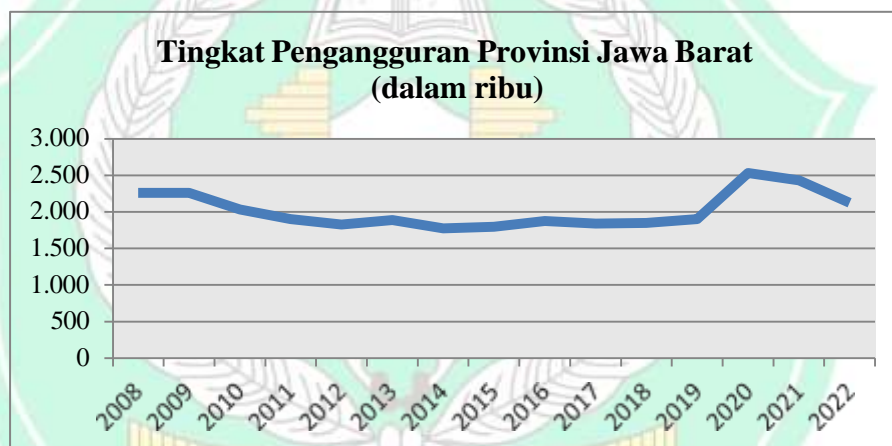
Upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah memang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun hal tersebut tentu mempunyai beberapa alasan tidak serta merta pemerintah menaikkan tingkat upah begitu saja. Upah minimum tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup para tenaga kerja yang dimana setiap tahun pasti akan mengalami perubahan harga.

Kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahunnya ternyata tetap saja masih belum bisa mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Adanya kebijakan desentralisasi membuat antar daerah satu dengan yang lainnya menetapkan tingkat upah yang berbeda. Dari adanya perbedaan itulah yang menjadi pendorong para tenaga kerja melakukan transmigrasi ke daerah dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Namun perpindahan tenaga kerja tersebut ada juga yang tidak diikuti dengan kemampuan atau *skill* yang mumpuni dan kesempatan kerja yang semakin terbatas (Winarto, dkk, 2022). Di sisi lain bagi para pengusaha juga harus menyesuaikan upah yang akan diberikan kepada pekerja dengan standar upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila terjadi kenaikan upah cenderung akan membuat para pengusaha mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi. Hal tersebut tentu akan berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja. Dengan munculnya permasalahan itu tentu upah minimum sangat mempengaruhi besar atau kecilnya angka pengangguran dan kemiskinan yang ada (Paramita, 2021).

Permasalahan pengangguran memang persoalan penting dalam sebuah perekonomian. Dari penelitian empiris mengatakan bahwa masalah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti: penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja meskipun permintaan tinggi, tingkat upah baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, tingginya inflasi sehingga menyebabkan perusahaan melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja, keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga

bertambahnya jumlah angkatan tenaga kerja baru tidak ikut terserap oleh penambahan lapangan pekerjaan (Suhendra dan Wicaksono, 2020).

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa upah minimum secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Namun apabila penggunaan tenaga kerja tidak dilakukan secara penuh maka pendapatan tidak akan mencapai nilai maksimum dan tentu akan menimbulkan banyak pengangguran (Utami, dkk, 2022). Pengangguran merupakan salah satu bentuk masalah makro dimana pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem perekonomian sehingga sulit diatasi karena menyangkut taraf hidup seseorang. Dibawah ini adalah penyajian data terkait angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022.



Gambar 1.4

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data-data penyajian diatas maka dapat diketahui bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan tingkat upah minimum yang dimana mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi masalah pengangguran tetap belum bisa terselesaikan. Jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami fluktuatif. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua permasalahan utama yang klasik dan sulit diatasi. Upaya menurunkan tingkat pengangguran sama pentingnya dengan kemiskinan. Pengangguran disebabkan karena meningkatnya angka tenaga kerja yang dominan daripada lapangan pekerjaan. Demikian juga dengan kemiskinan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana kesuksesan pembangunan.

Karena pada intinya tujuan dari pembangunan yaitu untuk memajukan kemakmuran masyarakat dan meminimalisir jumlah penduduk miskin. Dari data-data yang diperoleh peneliti yang telah dipaparkan diatas maka peneliti ingin meneliti lebih dalam apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang satu dengan yang lainnya atau tidak. Oleh karena itu, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah informasi bagi pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi seputar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Provinsi Jawa Barat menyebabkan tingkat kesejahteraan yang tidak merata yang dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih tinggi.
2. Kebijakan upah minimum yang belum mampu mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan mendorong para tenaga kerja melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lain yang menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan.
3. Pembangunan belum dilakukan secara merata sehingga masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada salah satu provinsi di Indonesia yakni Provinsi Jawa Barat dengan menganalisis salah satu masalah dalam perekonomian yaitu tingkat kemiskinan. Selain itu, agar pembahasan tidak keluar dari tujuan yang telah ditentukan maka fokus penelitian ini hanya pada fakto-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022?

3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022?
4. Apakah jumlah penduduk, upah minimum dan tingkat pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022.
2. Untuk menganalisis apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022.
3. Untuk menganalisis apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022.
4. Untuk menganalisis apakah jumlah penduduk, upah minimum dan tingkat pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memaksimalkan kinerjanya dalam proses pembangunan ekonomi, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab tingkat kemiskinan serta menangani permasalahan tersebut demi mencapai tujuan pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat.
 - b. Untuk menambah pengetahuan tentang topik terkait dan menjadi salah satu literatur atau sumber referensi bagi dunia praktisi atau akademisi serta menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon khususnya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah.
- b. Bagi peneliti sendiri menambah wawasan selama menempa ilmu sebagai mahasiswa ekonomi syariah serta mengimplementasikan nya ke dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2022.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi penjelasan atau uraian terkait latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang teori yang mendukung atau relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain memaparkan teori yang sesuai, pada bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yakni Provinsi Jawa Barat dan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan uji penelitian melalui software Eviews-12.

Bab V : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

G. Rencana Waktu Penelitian

Berikut merupakan rencana waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024
1.	Pengajuan wilayah kajian dan judul penelitian	√	√				
2.	Penyusunan dan bimbingan proposal		√				
3.	Seminar proposal		√				
4.	Revisi proposal		√	√			
5.	Penelitian skripsi			√			
6.	Bimbingan skripsi			√			
7.	Sidang komprehensif				-	√	
8.	Sidang munaqosah						√